



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Berkelanjutan Pencapaian Tujuan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Berkelanjutan Tujuan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
38. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132)
42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

50. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 48);
51. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 66);
52. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB IV
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dokumen Rencana Kerja :
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
 - g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
 - h. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
 - i. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
 - j. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
 - o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;

- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik;
 - t. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
 - u. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
 - v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
 - w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
 - x. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik;
 - y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
 - z. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
 - aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
 - bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;
 - cc. Kecamatan Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas;
 - ee. Kecamatan Manyar;
 - ff. Kecamatan Cerme;
 - gg. Kecamatan Benjeng;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan;
 - jj. Kecamatan Driyorejo;
 - kk. Kecamatan Wringinanom;
 - ll. Kecamatan Kedamean;
 - mm. Kecamatan Menganti;
 - nn. Kecamatan Sidayu;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah;
 - pp. Kecamatan Panceng;
 - qq. Kecamatan Bungah;
 - rr. Kecamatan Dukun;
 - ss. Kecamatan Sangkapura; dan
 - tt. Kecamatan Tambak.
- (3) Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta dokumen perencanaan lainnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 23 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 78

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK

BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik memuat program, kegiatan, lokasi dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Perhubungan dan RKPD.

Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui Forum Perangkat Daerah. Oleh karena itu, secara kontekstual dalam mekanisme perencanaan secara substantif Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2026 mengintegrasikan program-program pemerintah pusat sebagaimana amanat Peraturan Presiden tentang RKP, program Kabupaten Gresik maupun program-program hasil penjaringan aspirasi yang telah diformulasikan melalui Forum Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik tahun 2026 yang memuat prioritas pembangunan secara rinci dijabarkan dalam agenda pembangunan dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan dalam memanifestasikan kegiatan pembangunan di Gresik. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik berkewajiban menyusun rencana program dan kegiatan APBD. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBD, swasta, donor, masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam Renja

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik tahun 2026, menjadi acuan dalam penyusunan LKjIP APBD Kabupaten Gresik tahun 2026.

Sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1: Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan yang berlaku di Kabupaten Gresik ialah mengacu pada UU No 25 Tahun 2004 pasal 5 adalah sebagai berikut :

1. Renja PD ini merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Penyusunan Renja PD dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra PD dan RKPD Kabupaten Gresik. Selain itu, Renja PD ini disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan usulan dari bawah (*Buttom Up*) dan Usulan dari atas (*Top Down*). Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik ini dijabarkan dalam sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan indikatif.
2. Renja PD akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), RKA PD dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja PD Tahun 2026, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan yang harus dimiliki oleh Perangkat Daerah adalah :

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

3. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah)
4. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD 2026. Hal ini sebagaimana secara yuridis diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah untuk menjadi pedoman perencanaan dan penganggaran pada Renja Dinas Perhubungan dan RKPD Kabupaten Gresik.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Organisasi Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, dan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai:

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026
berdasarkan SIPD

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan di Kabupaten Gresik baik kegiatan yang bersifat perencanaan maupun yang bersifat teknis pembangunan secara proporsional telah berjalan dengan baik. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan Transportasi yang baik di Kabupaten Gresik. Indikator keberhasilan Pelayanan di bidang Transportasi dapat dilihat dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja PD s/d tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub (Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
		PERHUBUNGAN			450.939.875.594,00		115.204.700.043,21		70.327.454.107,00		60.792.982.940,11				175.997.682.983,32				
		DINAS PERHUBUNGAN			450.939.875.594,00		115.204.700.043,21		70.327.454.107,00	79,7	60.792.982.940,11								
	2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD Dinas Perhubungan	100	253.346.939.142,00	100	68.627.745.447,21	100	56.470.618.787,00	100	49.823.174.072,11	100,00	88,23	100	118.450.919.519,32	100,00	46,75		
	2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	658.955.602,00	100	293.539.700,00	100	99.999.471,00	50	99.103.000,00	50,00	99,10	100	392.642.700,00	100,00	59,59	Sekretariat	
	2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	276.441.165,00	-	31.174.400,00	2	49.074.851,00	2	48.387.000,00	100,00	98,60	2	79.561.400,00	25,00	28,78	Sekretariat	
	2 15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	64.417.500,00	-	33.110.700,00	3	50.924.620,00	2	50.716.000,00	66,67	99,59	2	83.826.700,00	16,67	130,13	Sekretariat	
	2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		40.669.568.590,00		13.808.886.572,00		7.429.787.958,00		7.144.322.581,11		96,16						
	2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	27.514.659.692,00	0	-	57	7.429.787.958	57	7.144.322.581,11	100,00	96,16	57	7.144.322.581,11	100,00	25,97	Sekretariat	
	2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	7.866.861.366,00	100	2.801.911.015,00	100	1.110.416.960,00	50	812.653.452,00	0,00	0,00	150	3.614.564.467,00	150,00	45,95		
	2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	56	436.486.050,00	-	61.424.500	4	110.059.277	2	28.838.500,00	50,00	26,20	2	90.263.000,00	3,57	20,68	Sekretariat	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub (Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
	2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	56	796.395.600,00	-	147.954.682	4	158.015.146	2	84.034.900,00	50,00	53,18	2	231.989.582,00	3,57	29,13	Sekretariat	
	2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	606.230.625,00	-	87.500.000	12	124.689.800	9	92.631.840,00	75,00	74,29	9	180.131.840,00	18,75	29,71	Sekretariat	
	2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48	703.227.525,00	-	136.843.000	2	136.837.010	2	135.929.200,00	100,00	99,34	2	272.772.200,00	4,17	38,79	Sekretariat	
	2 15 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	48	872.972.100,00	-	147.256.900	2	158.196.085	2	156.584.265,00	100,00	98,98	2	303.841.165,00	4,17	34,81	Sekretariat	
	2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	969.969.000,00	-	126.803.012	12	186.287.000	9	172.229.308,00	75,00	92,45	9	299.032.320,00	18,75	30,83	Sekretariat	
	2 15 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	48	464.100.000,00	-	-	1	236.332.642	-	142.405.439,00	0,00	60,26	-	142.405.439,00	0,00	30,68	Sekretariat	
	1 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	199.125.414.443,00	100	49.793.003.955,14	100	46.829.439.498,00	50	41.182.493.107,00	0,00	0,00	150	90.975.497.062,14	150,00	45,69		
	2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	175.000.000.000,00	-	36.687.429.013	12	41.071.250.723	9	35.396.782.357,00	75,00	86,18	9	72.084.211.370,00	18,75	41,19	Sekretariat	
	2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	472	15.714.934.200,00	-	5.303.781.455	12	5.758.188.775	9	5.785.710.750,00	75,00	100,48	9	11.089.492.205,00	1,91	70,57	Sekretariat	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub (Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
	1 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	5.026.139.141,00	100	1.930.404.205,07	100	1.000.974.900,00		584.601.932,00								
	2 15 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48	800.000.000,00	-	147.040.055	5	194.240.000	3	184.903.671,00	60,00	95,19	3	331.943.726,00	6,25	41,49	Sekretariat	
	2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56	1.027.001.953,00	-	212.296.313	18	180.760.000	13	169.376.036,00	72,22	93,70	13	381.672.349,00	23,21	37,16	Sekretariat	
	2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	1.473.783.828,00	-	-	1	625.974.900	-	230.322.225,00	0,00	0,00	-	230.322.225,00	0,00	15,63	Sekretariat	
Rata - rata capaian kinerja (%)												43,43	55,25			68,85	80,95		
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Rendah			Sedang	Tinggi		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub (Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
	2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tersedianya Fasilitas Keselamatan jalan	100	181.572.753.782,00	85	42.340.499.744,00	90	12.511.925.834,00	-	9.969.147.748,00	0,00	79,68	85	52.309.647.492,00	85,00	28,81		
			Tersedianya Angkutan Umum dalam Trayek	92,28		85,91		88,59		-		0,00	79,68	86		93,10	21,78		
			Persentase Kendaraan Lulus Uji	100		100		100		25		25,00	79,68	125		125,00	21,78		
			Terlaksanakannya Layanan Tertib Lalu Lintas	100		87,5		92,5		1		1,08	79,68	89		88,50	21,78		
			Terlaksananya Layanan Rekayasa Lalu Lintas	100		100		100		-		0,00	79,68	100		100,00	21,78		
			Tersedianya Tempat Parkir Khusus	100		66,67		75		-		0,00	79,68	67		66,67	21,78		
	2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Fasilitas terhadap pelaksanaan Penyediaan Perlengkapan Jalan	100	109.282.535.427,00	100	23.378.864.979,00	100	4.518.764.605,00	50	3.934.042.190,00	0,00	0,00	150	27.312.907.169,00	150,00	24,99		
	2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.000	24.468.378.000,00	-	2.881.599.980	350	4.518.764.605	260	3.934.042.190,00	74,29	87,06	260	6.815.642.170,00	13,00	27,85	Sarana dan Prasarana	
	2 15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Type C yang dikelola	3	8.280.460.000,00	3	1.379.391.198,00	3	910.120.000,00	-	432.098.000,00	0,00	0,00	3	1.811.489.198,00	100,00	21,88		
	2 15 02 2.03 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3	1.380.360.000,00	-	-	3	910.120.000	-	432.098.000,00	0,00	47,48	-	432.098.000,00	0,00	31,30	Sarana dan Prasarana	
	2.15 02 2 04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas terhadap Pengelolaan Parkir	100	27.776.914.993,00	100	6.427.377.245,00	100	3.397.689.180,00	50	2.751.544.970,00	0,00	0,00	150	9.178.922.215,00	150,00	33,05		
	2.15 02 2 04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	72	20.941.662.520,00	-	3.869.136.305	12	3.397.689.180	9	2.751.544.970,00	75,00	80,98	9	6.620.681.275,00	12,50	31,61	Sarana dan Prasarana	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub (Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
	2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	100	3.271.232.217,00	100	1.395.013.210,00	100	1.110.433.550,00	50	659.369.088,00	0,00	0,00	150	2.054.382.298,00	150,00	62,80		
	2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Uji Kendaraan Bermotor yang disediakan (<i>unit</i>)	39.400	185.000.000,00	19700	492.500.000	-	-	-	-	0,00	0,00	19.700	492.500.000,00	50,00	266,22	Angkutan	
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	39.400	500.000.000,00	-	250.000.000	4.000	100.035.000	2.000	100.000.000,00	50,00	99,97	2.000	350.000.000,00	5,08	70,00	Angkutan	
	2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	22	2.080.000.000,00	-	176.431.200	10	792.090.550	8	399.665.400,00	80,00	50,46	8	576.096.600,00	36,36	27,70	Angkutan	
	2 15 02 2.05 10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	22	590.000.000,00	-	-	12	218.308.000	9	159.703.688,00	75,00	73,16	9	159.703.688,00	40,91	27,07	Angkutan	
	2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100	24.385.474.322,00	100	6.336.770.585,00	100	1.350.118.840,00	50	1.178.577.530,00	0,00	0,00	150	7.515.348.115,00	150,00	30,82		
	2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	250	3.167.978.703,00	-	567.650.250	12	730.119.000	9	679.408.330,00	75,00	93,05	9	1.247.058.580,00	3,60	39,36	Lalu Lintas	
	2 15 02 2.06 16	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	250	3.099.999.200,00	-	-	9	619.999.840	6	499.169.200,00	66,67	80,51	6	499.169.200,00	2,40	16,10	Lalu Lintas	
	2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100	1.358.850.200,00	100	678.199.740,00	100	245.339.583,00	50	169.253.400,00	50,00	68,99	150	847.453.140,00	150,00	62,37		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub (Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
	2 15 02 2.08 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	55	295.800.500,00	-	-	12	49.841.683	6	43.443.600,00	0,00	0,00	6	43.443.600,00	10,91	14,69	Angkutan	
	2 15 02 2.08 07	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	96	586.493.700,00	-	-	12	195.497.900	6	125.809.800,00	50,00	64,35	6	125.809.800,00	6,25	21,45	Angkutan	
	2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100	1.830.361.380,00	100	-	100	610.120.460,00	50	572.338.000,00	50,00	93,81	150	572.338.000,00	150,00	31,27		
	2 15 02 2.09 03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	55	1.830.361.380,00	-	-	87	610.120.460	80	572.338.000,00	91,95	93,81	80	572.338.000,00	145,45	31,27	Angkutan	
	1 15 02 2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek	100	4.189.825.257,00	100	2.330.421.347,00	100	369.339.616,00	50	271.924.570,00	0,00	0,00	150	2.602.345.917,00	150,00	62,11		
	2 15 02 2.16 03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	500	2.955.400.000,00	-	483.250.854	12	369.339.616	9	271.924.570,00	75,00	73,62	9	755.175.424,00	1,80	25,55	Angkutan	
Rata - rata capaian kinerja (%)												42,78	53,01			52,01	63,87		
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Rendah			Rendah	Rendah		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub (Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
	2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Ketersediaan ASDP	100	9.645.908.392,00	75	2.181.332.818,00	75	970.915.364,00	-	665.201.800,00	0,00	68,51	75	2.846.534.618,00	75,00	29,51		
	2 15 03 2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	7.003.787.956,00	100	1.469.380.730,00	100	636.559.550,00	50	599.503.800,00	0,00	0,00	150	2.068.884.530,00	150,00	29,54		
	2 15 03 2.07 04	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	72	3.409.678.650,00	-	-	12	636.559.550	3	599.503.800,00	25,00	94,18	3	599.503.800,00	4,17	17,58	Angkutan	
	2 15 03 2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100	1.678.967.572,00	100	564.608.111,00	100	334.355.814,00	50	65.698.000,00	0,00	0,00	150	630.306.111,00	150,00	37,54		
	2 15 03 2.12 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1	1.062.952.572,00	-	-	-	334.355.814	-	65.698.000,00	0,00	19,65	-	65.698.000,00	0,00	6,18	Angkutan	
Rata - rata capaian kinerja (%)												5,00	22,77			62,92	70,50		
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sedang		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub (Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
	2 15 05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Peningkatan ketersediaan Sarana Keselamatan Perlintasan KA Sebidang	100	6.374.274.278,00	25	2.055.122.034,00	50	373.994.122,00	-	335.459.320,00	0,00	89,70	25	2.390.581.354,00	25,00	37,50		
	2 15 05 2.02	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap pelaksanaan pengawasan KA sebidang	100	1.741.961.000,00		482.876.034,00		373.994.122,00		335.459.320,00	0,00	0,00	-	818.335.354,00	0,00	46,98		
	2 15 05 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	-	982.499.000,00	-	-	12	373.994.122	3	335.459.320,00	25,00	89,70	3	335.459.320,00	0,00	-	Angkutan	
Rata - rata capaian kinerja (%)												12,50	44,85			25,00	44,37		
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Capaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2024, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, telah dapat dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

Pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran “**Persentase Prasarana Angkutan yang laik fungsi**” sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Prasarana Angkutan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menunjang sarana transportasi meliputi Halte, Terminal, Dermaga Penyeberangan.

Dalam menunjang peningkatan pelayanan di sektor Transportasi, diperlukan Prasarana Angkutan yang laik Fungsi sehingga dapat berfungsi secara optimal.

Jumlah Prasarana Angkutan yang ada di Kabupaten Gresik sebanyak 22 unit, dari 22 unit Prasarana Angkutan tersebut diatas semuanya berfungsi secara optimal. Hal ini dikarenakan telah dilaksanakannya Rehabilitasi dan Pemeliharaan terhadap Prasarana Angkutan sepanjang tahun 2024. Sehingga capaian dari Indikator Persentase Prasarana Angkutan yang laik fungsi sebesar 100%.

Pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran “**Persentase Ketersediaan dan Aksesibilitas Trayek**” sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Aksesibilitas Trayek adalah Kemudahan bagi Pengguna Angkutan umum untuk mendapatkan angkutan umum dan juga kemudahan untuk melakukan perjalanan ke daerah tujuan menggunakan Angkutan umum dengan prioritas keselamatan dan ketepatan waktu.

Jumlah Trayek Angkutan yang ditetapkan di Kabupaten Gresik sebanyak 17 Trayek, dari 17 Trayek Angkutan tersebut diatas, 8 Trayek sudah terintegrasi antar Moda, baik itu moda darat, laut maupun kereta. Sehingga Capaian dari target indikator Persentase Ketersediaan dan Aksesibilitas Trayek adalah sebesar 66,67%. Upaya yang dilaksanakan dalam

rangka memenuhi target dimaksud adalah melalui menyediakan Angkutan yang menghubungkan antara moda, renovasi Halte Antar Moda.

Pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran “Persentase Ruas Jalan di dalam Kota dengan Nilai VC Ratio >0,75” sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Nilai VC Ratio adalah Nilai Pelayanan Jalan atau **perbandingan volume dengan kapasitas**. Apabila nilai V/C ratio telah mencapai nilai 0.8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas

Jumlah ruas jalan Kabupaten di Kecamatan Kota di Kabupaten Gresik sebanyak 46 Ruas Jalan, dari 46 Ruas jalan tersebut 24 Ruas Jalan telah memiliki Nilai VC Ratio >0,75. Sehingga capaian dari indikator Persentase Ketersediaan dan Aksesibilitas Trayek adalah sebesar 52,17%. Upaya yang dilaksanakan guna memenuhi target indikator dimaksud adalah melalui pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas serta penempatan personil Pengatur Lalu Lintas di lokasi yang rawan kemacetan.

Berikut merupakan tabel hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan PD selama sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.2 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

No	Indikator	SPM/ Stand ar Nasion al	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catat an Analisis
				2024	202 5	202 6	202 7	2024	202 5	202 6	202 7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Prasarana Angkutan yang laik fungsi			100%				100%				
2	Persentase Ketersediaan dan Aksesibilitas trayek			64,71 %				35,29 %				
3	Persentase Ruas Jalan di Dalam kota dengan Nilai VC Ratio >0,75			52,17 %				52,17 %				
4	Cakupan layanan transportasi				36,31	40,78	40,78	36,31	36,31	40,78	40,78	
5	Nilai volume to capacity (VC) ratio jalan kabupaten gresik				80,43	82,61	84,78	80,43	80,43	82,61	84,78	

No	Indikator	SPM/ Stand ar Nasion al	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catat an Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang ramah energi				50%	60%	70%	50%	50%	60%	70%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2024, anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik sebesar Rp. 70.327.454.107,00 yang direalisasikan sebesar Rp. 60.792.982.940,11 atau 86,44%. Dengan capaian realisasi anggaran sebesar 86,44% Dinas Perhubungan masih dapat mengusahakan ketercapaian target indikator kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan melalui Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Persentase Prasarana Angkutan yang laik fungsi	100%	100%	100,00%	9.937.007.454,00	7.777.054.248,00	78,26%
		Persentase Ketersediaan dan Aksesibilitas trayek	66,67%	66,67%	100,00%	2.569.709.145,00	2.014.177.090,00	78,38%
		Persentase Ruas Jalan di dalam Kota dengan Nilai VC Ratio >0,75	50,00%	52,17%	104,35%	1.350.118.505,00	1.178.577.530,00	87,29%
	Rata – rata capaian kinerja				101,45 %			81,31%

2.3.2 Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kebijakan Dinas Perhubungan Kabuapten Gresik dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan dirumuskan sebagai berikut:

- A. Kebijakan Tata Kelola Prasarana Perhubungan
- B. Kebijakan Angkutan
- C. Kebijakan Kelalulintasan

2.3.3 Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun tingkat analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dalam tabel sebagai berikut :

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Ranwal Renja PD dalam rangka mempersiapkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD Tahun 2026. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan untuk pelaksanaan Renja ini telah disesuaikan untuk mencapai keberhasilan pembangunan Kabupaten Gresik. Untuk lebih jelasnya terkait hasil review terhadap rancangan RKPD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026 dengan usulan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 berdasarkan hasil analisis kebutuhan ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 7 (Tabel T-C.31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				68.122.218.667,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				67.244.742.843,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				50.566.326.368,85	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				48.730.641.487,00	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penyediaan Perlengkapan Jalan	100%	43.176.195.821,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penyediaan Perlengkapan Jalan	100%	43.085.148.224,00	
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang disediakan	100	2.704.316.040,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang disediakan	100	2.704.316.040,00	
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Gresik	JumlahPerlengkapan Jalan yang direhabilitasi dan dipelihara (unit)	350	40.471.879.781,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Gresik	JumlahPerlengkapan Jalan yang direhabilitasi dan dipelihara (unit)	350	40.380.832.184,00	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Terminal Type C yang dikelola		812.762.856,05	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Terminal Type C yang dikelola		804.940.280,00	
3	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Gresik	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	2	413.031.107	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Gresik	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	2	380.100.500,00	
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kab. Gresik	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2	399.731.749	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kab. Gresik	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2	424.839.780,00	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase Pengelolaan Parkir yang difasilitasi		2.925.659.588,00	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase Pengelolaan Parkir yang difasilitasi		1.650.422.500,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	2.925.659.588	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	1.650.422.500,00	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor yang difasilitasi		1.121.610.910,72	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor yang difasilitasi		776.241.800,00	
6	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4000	150.018.000,00	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4000	150.018.000,00	
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Gresik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9	775.006.910,12	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Gresik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9	578.163.800,00	
8	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Gresik	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12	196.586.000,60	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Gresik	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12	48.060.000,00	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1.712.912.088,20	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1.709.887.483,00	
9	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	878.729.539,47	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	522.163.640,00	
10	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Gresik	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4	834.182.548,73	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Gresik	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4	1.187.723.843,00	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				300.640.131,60	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				215.915.200,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2	165.607.621	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2	162.206.000,00	
12	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12	135.032.511	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12	53.709.200,00	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				516.544.973,27	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				488.086.000,00	
13	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	64	516.544.973	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	64	488.086.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				555.402.408,61	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				895.436.700,00	
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				322.012.204,65	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				217.526.300,00	
14	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	322.012.205	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	217.526.300,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dalam Daerah Kabupaten/Kota					dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				233.390.203,96	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				668.252.300,00	
15	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Gresik	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1	233.390.204	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Gresik	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1	668.252.300,00	
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				-	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				9.658.100,00	
16	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Gresik	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1	-	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Gresik	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1	5.000.000,00	
17	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kab. Gresik	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1	-	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kab. Gresik	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1	4.658.100,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				318.999.160,58	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				650.957.900,00	
	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				318.999.160,58	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				650.957.900,00	
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1	12	318.999.161	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1	12	650.957.900,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota			(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.681.490.729,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.967.706.756,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				145.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				99.822.400,00	
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah <i>(dokumen)</i>	3	75.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah <i>(dokumen)</i>	3	52.994.600,00	
20	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD <i>(dokumen)</i>	3	70.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD <i>(dokumen)</i>	3	46.827.800,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.703.536.055,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.703.536.055,00	
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN <i>(orang)</i>	68	9.703.536.055,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN <i>(orang)</i>	68	9.703.536.055,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gresik			639.160.542,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gresik			579.370.220,00	
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gresik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	48.160.542,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gresik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	9.122.800,00	
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	180.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	49.018.800,00	
24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	98.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	59.685.400,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gresik	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	75.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gresik	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	40.000.000,00	
26	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Gresik	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	60.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Gresik	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	55.000.000,00	
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	103.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	221..000,00	
28	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	75.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	145.515.,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				985.000.000,00	
29	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gresik		1	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gresik		1	985.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.996.254.132,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.424.978.081,00	
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	528.500.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	540.793.600,00	
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	5.467.754.132,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	4.884.184.481,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				197.540.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				175.000.000,00	
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gresik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	86.740.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gresik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	75.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gresik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	110.800.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gresik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	100.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik mengakomodir usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi dan Lembaga lainnya berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang. Pada tahun 2026 masih belum terdapat usulan kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berlandaskan penyelarasan terhadap peraturan presiden republik indonesia Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Jawa timur, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ... Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. maka tema pembangunan Gresik Tahun 2026 adalah : “Percepatan Transformasi Sosial, Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Didukung dengan tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif”

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *Specific*,

Measurable, Agresive but attainable, Result oriented dan Time bond. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Transportasi dengan didukung upaya mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan”

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi, untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan
Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
 - a. Persentase Ruas Jalan Kabupaten yang terfasilitasi trayek angkutan umum (%)
 - b. Nilai Volume to Capacity (VC) Ratio Jalan Kabupaten Gresik (%)
2. Meningkatkan transportasi dan infrastruktur ramah lingkungan serta mendorong penerapan energi hijau dan tanggung jawab lingkungan oleh sektor publik dan swasta.
Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah:
 - a. Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang ramah energi (%).

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Dinas Perhubungan menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi dengan rincian per sasaran sebagai berikut:

- A. Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing Daerah” maka dirumuskan program kerja sebagai berikut:
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan pokok yaitu :

1) Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Fasilitas Kunjungan Tamu
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi, untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan” maka dirumuskan program kerja sebagai berikut:

1. Program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)) dengan kegiatan pokok yaitu :

1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

2) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan ;

- a. Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C
- b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

2) Program PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN dengan kegiatan pokok yaitu :

1) Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

2) Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan ;

- a. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal

C. Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatkan transportasi dan infrastruktur ramah lingkungan serta mendorong penerapan energi hijau dan tanggung jawab lingkungan oleh sektor publik dan swasta” maka dirumuskan program kerja sebagai berikut:

1. Program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)) dengan kegiatan pokok yaitu :

- 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

- 2) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kotadalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pada perumusan Rencana Kerja DInas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2026 Jumlah program yang dirumuskan sebanyak 4 (empat) program, 16 Kegiatan, dan 31 Sub Kegiatan yang sebaran lokasi pekerjaannya disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp 67.244.742.843, yang sumber dananya direncanakan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2026, telah dilakukan penyesuaian terhadap rumusan program dan kegiatan yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. Penyesuaian ini dilakukan sebagai hasil dinamika perencanaan dan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah serta pertimbangan terhadap berbagai faktor. Faktor - faktor yang dapat mempengaruhi penyesuaian Renja PD antara lain, perubahan prioritas pembangunan daerah, keterbatasan kapasitas fiskal dan realokasi pagu indikatif, hasil musrenbang dan forum perangkat daerahm penyesuaian terhadap regulasi dan standar teknis terbaru dan opetimalisasi

kinerja perangkat daerah. Dengan demikian perubahan pada rumusan program dan kegiatan dalam Renja ini merupakan bentuk adaptasi perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan kondisi actual tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Hasil penyusunan tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 1 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Gresik
Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun + 1
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS PERHUBUNGAN													
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				67.096.369.823,00				76.765.076.976,00
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				48.582.268.467,00				58.464.743.140,00
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penyediaan Perlengkapan Jalan		100%	43.085.148.224,00				48.500.000.000,00
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang disediakan	Kab. Gresik	100	2.704.316.040,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		100	3.500.000.000,00
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	JumlahPerlengkapan Jalan yang direhabilitasi dan dipelihara (unit)	Kab. Gresik	350	40.380.832.184,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		350	45.000.000.000,00
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Type C yang dikelola			656.567.260,00				1.300.000.000,00
2	15	02	2.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Gresik	2	460.147.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	550.000.000,00
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kab. Gresik	2	196.419.960,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	750.000.000,00
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pengelolaan Parkir yang difasilitasi			1.650.422.500,00				1.650.422.500,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun + 1
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	12	1.650.422.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	1.650.422.500,00
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor yang difasilitasi			776.241.800,00				776.241.800,00
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Gresik	4000	150.018.000,00	Opsen PKB		4000	150.018.000,00
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kab. Gresik	9	578.163.800,00	Opsen PKB		9	578.163.800,00
2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Gresik	12	48.060.000,00	Opsen PKB		12	48.060.000,00
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1.709.887.483,00				2.522.163.640,00
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	12	522.163.640,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	522.163.640,00
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Gresik	4	1.187.723.843,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4	2.000.000.000,00
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				215.915.200,00				215.915.200,00
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	2	162.206.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	162.206.000,00
2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Gresik	12	53.709.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	53.709.200,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun + 1
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				488.086.000,00				3.500.000.000,00
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	64	488.086.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		64	3.500.000.000,00
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				895.436.700,00				677.184.400,00
2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				217.526.300,00				217.526.300,00
2	15	03	2.07	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	12	217.526.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	217.526.300,00
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				668.252.300,00				450.000.000,00
2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Kab. Gresik	1	668.252.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	450.000.000,00
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				9.658.100,00				9.658.100,00
2	15	03	2.13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Kab. Gresik	1	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	5.000.000,00
2	15	03	2.13	0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Kab. Gresik	1	4.658.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	4.658.100,00
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				650.957.900,00				650.957.900,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun + 1
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	05	2.02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				650.957.900,00				650.957.900,00
2	15	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	12	650.957.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	650.957.900,00
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.967.706.756,00				16.972.191.536,00
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				99.822.400,00				99.822.400,00
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (<i>dokumen</i>)	Kab. Gresik	3	52.994.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		3	52.994.600,00
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (<i>dokumen</i>)	Kab. Gresik	3	46.827.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		3	46.827.800,00
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.703.536.055,00				9.703.536.055,00
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (<i>orang</i>)	Kab. Gresik	68	9.703.536.055,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		68	9.703.536.055,00
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Gresik		579.370.220,00				583.855.000,00
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gresik	1	9.122.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	9.122.800,00
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gresik	3	49.018.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		3	49.018.800,00
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Gresik	11	59.685.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		11	59.685.400,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun + 1
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gresik	2	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	40.000.000,00
2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Gresik	2	55.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	55.000.000,00
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik	12	221.028.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	221.028.000,00
2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gresik	2	145.515.220,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	150.000.000,00
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				985.000.000,00				985.000.000,00
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Gresik	1	985.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	985.000.000,00
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.424.978.081,00				5.424.978.081,00
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gresik	12	540.793.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	540.793.600,00
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gresik	12	4.884.184.481,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	4.884.184.481,00
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				175.000.000,00				175.000.000,00
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Gresik	5	75.000.000,00	Retribusi Jasa Umum		5	75.000.000,00
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gresik	8	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		8	100.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menampilkan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah tahun 2026 berdasarkan SIPD, sebagaimana berikut:

Tabel 4. 1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Perhubungan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran	
										2025	2026
(1)						(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)
2	15					DINAS PERHUBUNGAN				66.122.436.684	67.244.742.843
2	15	02	2			PROGRAM PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				48.455.974.524	48.730.641.487
2	15	02	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab Gresik	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penyediaan Perlengkapan Jalan		39.853.074.922	43.085.148.224
2	15	02	2	02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab Gresik	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	268.293.000,00	2.704.316.040,00
2	15	02	2	02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab Gresik	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	350	39.584.781.922,00	40.380.832.184,00
2	15	02	2	03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab Gresik	Jumlah Terminal Tipe C yang dikelola		840.220.500	804.940.280
2	15	02	2	03	06	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Kab Gresik	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	2	380.100.500,00	380.100.500,00
2	15	02	2	03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kab Gresik	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2	460.120.000	424.839.780,00
2	15	02	2	04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab Gresik	Fasilitasi terhadap Pengelolaan Parkir		4.768.778.374	1.650.422.500
2	15	02	2	04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Gresik	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	4.768.778.373,64	1.650.422.500,00
2	15	02	2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Gresik	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor		785.433.550	776.241.800
2	15	02	2	05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Gresik	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3000	100.035.000	150.018.000,00
2	15	02	2	05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Gresik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9	467.090.550	578.163.800,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran	
										2025	2026
(1)						(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)
2	15	02	2	05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Gresik	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9	218.308.000	48.060.000,00
2	15	02	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab Gresik	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		1.094.118.935	1.709.887.483
2	15	02	2	06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab Gresik	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	594.119.000	522.163.640,00
2	15	02	2	06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab Gresik	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5	499.999.935	1.187.723.843,00
2	15	02	2	08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab Gresik	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ		245.339.583	215.915.200
2	15	02	2	08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab Gresik	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2	49.841.683	162.206.000,00
2	15	02	2	08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab Gresik	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12	195.497.900	53.709.200,00
2	15	02	2	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Gresik	Fasilitasi terhadap Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		610.120.460	488.086.000
2	15	02	2	09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Gresik	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63	610.120.460	488.086.000,00
2	15	02	2	11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Gresik	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		258.888.200	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran	
										2025	2026
(1)						(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)
2	15	02	2	11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Gresik	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	258.888.200	-
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kab Gresik	Persentase Ketersediaan ASDP		543.939.103	895.436.700
2	15	03	2	07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Gresik	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		287.607.	.526.300
2	15	03	2	07	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Gresik	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	287.607.500,00	217.526.300,00
2	15	03	2	12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab Gresik	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		256.331.603	668.252.300
2	15	03	2	12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab Gresik	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1	256.331.603	668.252.300,00
2	15	03	2	15		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab Gresik	Fasilitasi terhadap pelaksanaan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		-	9.658.100
2	15	03	2	15	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab Gresik	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	0	-	5.000.000,00
2	15	03	2	15	0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kab Gresik	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	0	-	4.658.100,00
						PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		Persentase ketersediaan Sarana Keselamatan Perlindungan KA Sebidang		373.994.122	650.957.900
2	15	05	2	02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Fasilitasi terhadap pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan		373.994.122	650.957.900

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran	
										2025	2026
(1)						(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)
								Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	05	2	02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	373.994.122	650.957.900,00
2	15	01	2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Gresik	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		16.748.528.935	16.967.706.756,00
2	15	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Gresik	Persentase Fasilitas terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		107.965.400	99.822.400,00
2	15	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Gresik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (<i>dokumen</i>)	2	50.934.100,00	52.994.600,00
2	15	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Gresik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (<i>dokumen</i>)	3	57.031.300,00	46.827.800,00
2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Gresik	Fasilitas terhadap Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.703.536.055	9.703.536.055,00
2	15	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Gresik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (<i>orang</i>)	60	9.703.536.055,49	9.703.536.055,00
2	15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Gresik	Fasilitas terhadap Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		439.539.364	579.370.220,00
2	15	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Gresik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	42.705.380,00	9.122.800,00
2	15	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	170.518.800,00	49.018.800,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran	
										2025	2026
(1)						(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)
2	15	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	59.685.400,00	59.685.400,00
2	15	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Gresik	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	37.643.000,00	40.000.000,00
2	15	01	2	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Kab Gresik	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	55.064.540,00	55.000.000,00
2	15	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	49.619.923,00	221.028.000,00
2	15	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab Gresik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	24.302.321,00	145.515.220,00
2	15	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Gresik	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	985.000.000,00
2	15	01	2	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Gresik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	0	-	985.000.000,00
2	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Gresik	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.985.477.500	5.424.978.081,00
2	15	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	528.500.000,00	540.793.600,00
2	15	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	5.456.977.500,00	4.884.184.481,00
2	15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Gresik	Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		512.010.616	175.000.000,00
2	15	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Gresik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	70.932.500,00	75.000.000,00
2	15	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Gresik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	72.150.000,00	100.000.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran	
										2025	2026
(1)						(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)
2	15	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Gresik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1	368.928.116,00	-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang didalamnya memuat kebijakan pembangunan yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik ditetapkan untuk memberi arah dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gresik maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Dalam masa pelaksanaan satu tahun kedepan apabila terdapat perubahan kebijakan maka Renja ini dapat dievaluasi sesuai kondisi fiskal daerah.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran, disiplin dan transparansi dari para pelaku pembangunan (*Stakeholders*), sehingga mampu untuk menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

